

**PENGARUH DANA DESA, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR  
PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN:  
STUDI KASUS PROVINSI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DIRGA ADI CHANDRA**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRACT**

### ***THE EFFECT OF VILLAGE FUNDS, EDUCATION SECTOR GOVERNMENT SPENDING AND HEALTH SECTOR ON POVERTY: A CASE STUDY OF LAMPUNG PROVINCE***

***By***

**DIRGA ADI CHANDRA**

*This study aims to determine the effect of Village Fund Allocation and government spending on the percentage of poverty in Lampung Province in 2015-2019 and 2015-2021 after pandemic. This research uses secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics for Lampung Province and the Ministry of Finance. The analysis tool used is multiple regression analysis of panel data using the E-views 12 application. The results of panel data regression analysis with the selected model, namely the Random Effect Model (REM) show that independent variables, namely Village Funds, Government Expenditure in the Health Sector, have an effect negatively and significantly to the percentage of poverty in accordance with the theories and hypotheses in this study. But Government Expenditures in the Education Sector has not been able to provide a significant effect on reducing poverty in Lampung Province. It is hoped that this study can assist the government in deciding policy considerations that can reduce poverty.*

***Keywords : Poverty, Government Expenditure, Village Fund, Education, Health, Panel Data***

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH DANA DESA, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN: STUDI KASUS PROVINSI LAMPUNG**

**OLEH**

**DIRGA ADI CHANDRA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa dan belanja pemerintah terhadap persentase kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dan 2015-2021 pascapandemi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Kementerian Keuangan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dengan menggunakan aplikasi *E-views 12*. Hasil analisis regresi data panel dengan model terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM) menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan sesuai dengan teori dan hipotesis dalam penelitian ini. Namun Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam memutuskan pertimbangan kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan.

**Kata Kunci : Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Dana Desa, Pendidikan,  
Kesehatan, Data Panel**

**PENGARUH DANA DESA, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR  
PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN:  
STUDI KASUS PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**DIRGA ADI CHANDRA**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PENGARUH DANA DESA, PENGELUARAN  
PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN  
SEKTOR KESEHATAN TERHADAP  
KEMISKINAN: STUDI KASUS PROVINSI  
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dirga Adi Chandra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1951021006**

Jurusan : **S1 Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si**  
NIP 19590719 198703 1 002

**MENGETAHUI**

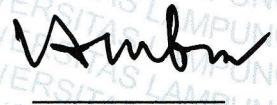
**Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

**Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.**  
NIP 19631215 198903 2 002

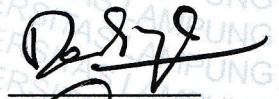
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

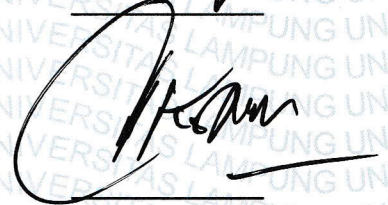
Ketua : **Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si.**



Penguji I : **Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.**



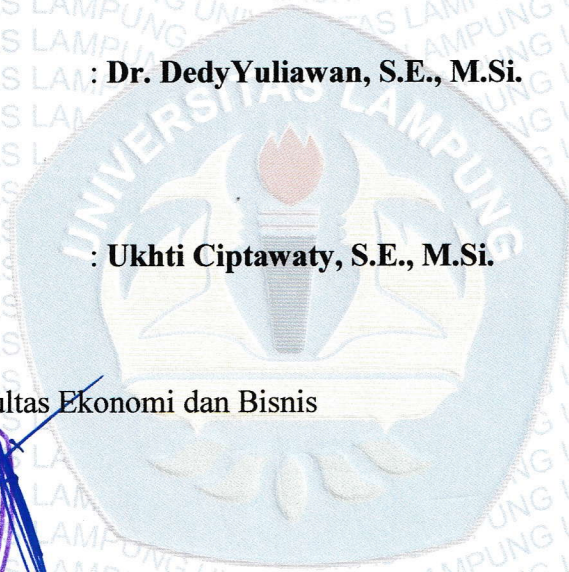
Penguji II : **Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

NIP.19660621 199003 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **18 Juli 2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juli 2023  
Penulis



Dirga Adi Chandra

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir di Lampung Barat pada tanggal 17 Agustus 1999, merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara pasangan Zulkifli dan Masyana

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Tanjung Raya Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat yang ditamatkan pada tahun 2012. Selanjutnya menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat yang ditamatkan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 01 Bandar Lampung yang ditamatkan pada tahun 2018.

Setelah menyelesaikan jenjang sekolah menengah, penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung di Jurusan Ekonomi Pembangunan pada tahun 2019 dan diterima lewat jalur Mandiri. Selama melajani kegiatan kuliah penulis tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNILA. Penulis menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat.



## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Verily, with every difficulty there is relief.”*

(Al-Insyirah 94 : 6)

***“Have Courage and Be Kind”***

*(Cinderella, 2016)*

***Dang Salah Guna, Dang Lupa Lapah***

*“do not misuse, do not forget your purpose”*

(Zulkifli, 2015)

## PERSEMBAHAN



*Sujud syukur kupersembahkan kepada Tuhanku Allah SWT atas segala karunia, rahmat, cinta, dan kasih sayang-Nya yang melimpah. Shalawat serta salam juga selalu kupanjatkan bagi suri tauladanku Nabi Muhammad S.A.W.*

*Dengan kerendahan hati, bersama keridhaan-Mu ya Allah, kupersembahkan karya kecil penuh cinta ini kepada:*

*Kedua Orang Tuaku Tersayang*

***Zulkifli  
Masyana***

*Terimakasih atas setiap bait doa, nasihat, dan pelukmu telah menghantarkan diriku menuju hari esok yang cerah. Mungkin tak pernah terucap, namun hati ini selalu bicara, sungguh ku sayang kalian. Tiada mungkin setiap pengorbanan dapat kubalas dengan apapun selain meminta kepada-Nya yang Kuasa posisi terbaik untuk Mama dan Papa di Jannah.*

*Serta*

***Almamater tercinta  
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung***

*Semoga karya kecil ini bermanfaat*

## SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana pengasih lagi maha penyayang, yang tiada hentinya memberikan nikmat dan rahmat serta kekuatan kepada Penulis. Shalawat serta salam tidak lupa Penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perantaranya kita semua bisa merasakan nikmatnya kehidupan.

Dengan berbekal kesabaran, keyakinan, kemauan, dan kerja keras serta dukungan juga doa dari berbagai pihak, dan tak lupa Ridho dari Allah SWT sehingga akhirnya Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Provinsi Lampung” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan di Universitas Lampung.

Selama proses menulis skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekuarangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Seingganya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh Penulis sangat mempermudah proses penyelesaian skripsi ini. Karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ambya., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan setulus hati membimbing dan memberikan ilmu, kritik dan saran, arahan, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta Dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati selalu siap membantu,

membimbing, memberikan ilmu serta memberikan dukungan yang terbaik sehingga Penulis sangat termotivasi dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ukhti Ciptawaty, S.E.,M.Si., selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Heru Wahyudi S.E.,M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan hingga kelulusan.
7. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akadamik yang telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
8. Seluruh dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan.
10. Yang sangat aku cintai Bak dan Mak, Zulkifli dan Masyana, Orang Tuaku yang paling hebat yang selalu mendoakan dan mendukungu disetiap proses perjalananku. Terima kasih atas segala usaha terbaik yang telah diberikan kepada Penulis, telah dengan sepenuh hati menyayangi dan membesarkan penulis, semoga kedepannya dapat menjadi anak yang membanggakan dan berguna bagi Bak dan Mak.
11. Ketujuh Kakakku yang aku sayangi yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terimakasih atas waktu dan materi yang telah

diluangkan untuk penulis sehingga bisa terus semangat dalam menyelesaikan studi ini. Semoga selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan.

12. Almamater tercinta, Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengenyam pendidikan.
13. Sahabat terbaikku, Tiara Tiur, Mutia Lutfia, Putri Aldina, dan Ayu Nathania. Terimakasih telah hadir dalam hidup Penulis serta berbagi memori yang takkan pernah terlupakan. Semoga tetap bersama hingga hari tua.
14. Sahabat-sahabat anti-dramaku yaitu Sinta, Anggi, Ageng, Haning, Rafli, Maul, Arsy, Nia, dan Desi. Terima kasih karena selalu ada dan selalu siap mendengarkan serta berbagi keluh kesah selama Penulis membutuhkan.
15. Sahabat seperjuanganku selama masa perkuliahan hingga kelulusan ini (Miss Indipindin) Austine Rahmadiani, Resilia Salsabila, Shafa Marwa, dan Muhammad Derry Andian. Terima kasih karena selalu siap membantu dan saling memberikan motivasi dalam menjalani kehidupan kuliah ini.
16. Teman-teman YOLO yang selalu kompak sejak MABA yaitu Yolanda Gorety, Shantika Amanda, Kholis Daffa Hanifa, Devis Anezza, Toyo, Kemal dan teman-teman lainnya.
17. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2019 yang siap saling membantu setiap Penulis memiliki kesulitan dalam perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
18. Berbagai pihak lainnya yang ikut serta membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
19. *Dear Self, you've dedicated considerable effort over the past six months, and indeed throughout your entire life. You've gained numerous valuable insights on ethical behavior. While ethics is an ongoing journey, we'll continue to learn and improve together. I appreciate your perseverance and refusal to surrender. There's still much more for us to discover jointly. Remember, nobody is flawless, but we will undoubtedly achieve advancements. We have the capability, and we will succeed.*

Akhir kata, sepenuhnya Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembacanya.

Semoga segala dukungan, bimbingan dan doa yang diberikan kepada Penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin YRA.

Bandar Lampung,  
Penulis

Dirga Adi Chandra

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>IV</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>13</b>
2.1.1 Kemiskinan .....	13
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah.....	18
2.1.3 Dana Desa .....	21
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan .....	25
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.....	27
<b>2.2 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>29</b>
<b>2.3 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>31</b>
<b>2.4 Hipotesis Penelitian</b> .....	<b>32</b>
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
<b>3.1 Jenis dan Sumber Data</b> .....	<b>33</b>
<b>3.2 Definisi Operasional</b> .....	<b>34</b>
<b>3.3 Wilayah Penelitian</b> .....	<b>35</b>
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>35</b>
<b>3.5 Teknik Analisis Data</b> .....	<b>36</b>
3.5.1 Regresi Data Panel .....	37
3.5.2 Pemilihan Model Regresi Estimasi Data Panel.....	39
3.5.3 Uji Asumsi Klasik .....	40
3.5.4 Pengujian Hipotesis.....	42
3.5.5 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	44
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>45</b>
<b>4.1 Analisis Statistik Deskriptif</b> .....	<b>45</b>
<b>4.2 Hasil Uji Regresi Data Panel</b> .....	<b>47</b>

4.2.1 Uji Spesifikasi Model.....	47
4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	50
<b>4.3 Uji Asumsi Klasik.....</b>	<b>52</b>
4.4.1 Uji Multikolinearitas.....	52
4.4.2 Uji Heterokedastisitas.....	52
<b>4.4 Uji Hipotesis.....</b>	<b>53</b>
4.4.3 Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t-Statistik).....	53
4.4.4 Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji F-Statistik).....	56
<b>4.5 Koefisien Determinasi (<math>R^2</math>).....</b>	<b>57</b>
<b>4.6 Nilai <i>Individual Effect</i>.....</b>	<b>57</b>
<b>4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>	<b>63</b>
4.7.1 Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung.....	66
4.7.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung.....	67
4.7.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung.....	70
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 2. Deskripsi Data.....	33
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Periode Penelitian Tahun 2015-2019.....	45
Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Periode Penelitian Tahun 2015-2021.....	45
Tabel 5. Hasil Uji Chow Periode Penelitian 2015-2019 .....	48
Tabel 6. Hasil Uji Chow Periode Penelitian 2015-2021 .....	48
Tabel 7. Hasil Uji Hausman Periode Penelitian 2015-2019 .....	49
Tabel 8. Hasil Uji Hausman Periode Penelitian 2015-2021 .....	49
Tabel 9. Hasil Uji LM Periode Penelitian 2015-2019.....	49
Tabel 10. Hasil Uji LM Periode Penelitian 2015-2021.....	50
Tabel 11. Hasil Estimasi Regresi Data Panel Periode Penelitian 2015-2019 .....	50
Tabel 12. Hasil Estimasi Regresi Data Panel Periode Penelitian 2015-2021 .....	51
Tabel 13. Hasil Uji Multikolinearitas Periode Penelitian 2015-2019.....	52
Tabel 14. Hasil Uji Multikolinearitas Periode Penelitian 2015-2021 .....	52
Tabel 15. Hasil Uji Heterokedastisitas Periode Penelitian 2015-2019 .....	53
Tabel 16. Hasil Uji Heterokedastisitas Periode Penelitian 2015-2021.....	53
Tabel 17. Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial Periode Penelitian 2015-2019.....	54
Tabel 18. Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial Periode Penelitian 2015-2021.....	54
Tabel 19. Uji Signifikansi Secara Simultan Periode Penelitian 2015-2019.....	56
Tabel 20. Uji Signifikansi Secara Simultan Periode Penelitian 2015-2021.....	56
Tabel 21. Nilai Individual Effect Periode Penelitian tahun 2015-2019.....	57
Tabel 22. Nilai Individual Effect Periode Penelitian tahun 2015-2021 .....	58

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung tahun 2015-2021...	3
Gambar 2. Persentase Kemiskinan 13 Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2021 .....	4
Gambar 3. Realisasi Dana Desa di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2015-2021.....	5
Gambar 4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2015-2021.....	7
Gambar 5. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2015-2021.....	8
Gambar 6. Kerangka Pemikiran.....	31

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang serius di setiap negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang (Dewi & Irama, 2018). Isu kemiskinan ini merupakan momok yang menakutkan dan sulit untuk diatasi, bahkan mungkin tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena terkait dengan ketidakmampuan secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat Syauqi & Arsyianti (2017) kemiskinan memiliki arti yang lebih luas karena juga terkait dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan aspek lainnya di luar penghasilan.

Nenbee et al. (2021) melihat kemiskinan sebagai ukuran gabungan dari indikator ekonomi dan sosial pembangunan manusia yang mencakup umur panjang, pengetahuan, daya beli, dan indikator lainnya, dengan perspektif pengukuran kemiskinan ini didasarkan pada sudut pandang yang beragam. Menurut UNDP (2003), terdapat tiga perspektif dalam mendefinisikan kemiskinan. Pertama, perspektif pendapatan mengukur kemiskinan berdasarkan penurunan pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan secara finansial. Kedua, perspektif kebutuhan dasar melihat kemiskinan sebagai kekurangan dalam memenuhi kebutuhan materi dasar manusia yang diterima secara sosial, termasuk makanan, kesehatan dasar, pendidikan, layanan penting, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang dianggap normatif. Ketiga, perspektif kapasitas yang mencerminkan ketidakmampuan dalam memiliki beberapa kemampuan dasar untuk berfungsi secara memadai.

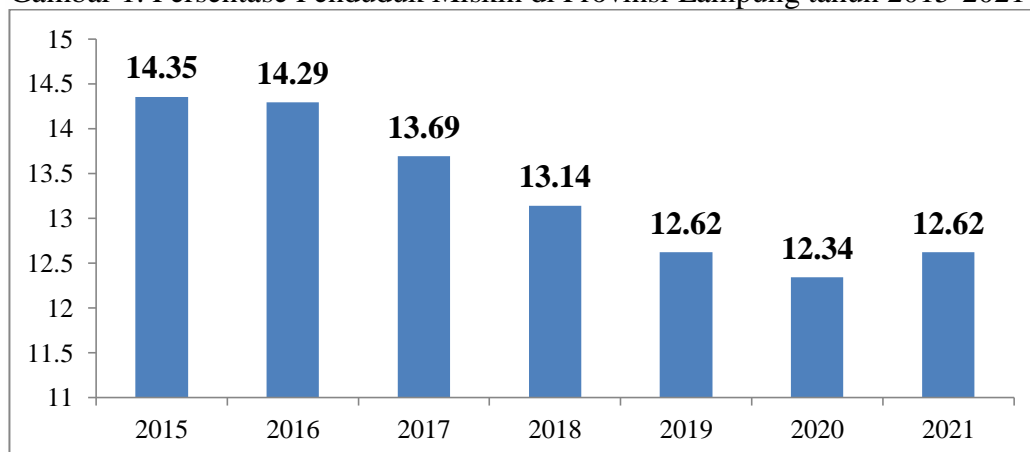
Meskipun sulit untuk menghapus kemiskinan sepenuhnya, tetapi hal ini tidak boleh diabaikan karena dapat menyebabkan dampak negatif yang besar. Ketidakmampuan dalam memperoleh pendidikan yang baik, minimnya akses kesehatan berkualitas, serta sulitnya untuk memperoleh kehidupan yang layak dapat mengarah pada rendahnya produktivitas, yang selanjutnya berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima. Kurangnya pendapatan akan kembali memperparah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan membentuk sebuah siklus kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan secara komprehensif dalam mengatasi masalah kemiskinan yang kompleks dan sering terjadi di suatu wilayah (Roseline & Maimunah, 2022). Untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, diperlukan pendekatan holistik yang mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan memberikan prioritas pada akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Hal ini mencakup investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja dan wirausaha. Program-program pengurangan kemiskinan dan jaring pengaman sosial juga dapat membantu masyarakat yang hidup dalam kemiskinan untuk keluar dari siklus kemiskinan.

Suharto (2009) mengidentifikasi empat penyebab kemiskinan yang meliputi faktor individual, faktor sosial, faktor kultural, dan faktor struktural. Faktor individual dapat terjadi karena kondisi fisik atau kesehatan seseorang yang membatasi kemampuannya untuk bekerja dan berusaha. Faktor sosial terjadi akibat diskriminasi sosial yang dihadapi oleh seseorang. Faktor kultural terkait dengan perilaku buruk individu, seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Sedangkan faktor struktural terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi yang memiskinkan orang. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu, sedangkan faktor eksternal meliputi keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas, dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnya penduduk miskin.

Sigit & Kosasih (2020) Akses masyarakat akan sumber-sumber ekonomi masih terbatas, meskipun berbagai program pemerintah telah dilakukan dengan tujuan

mengurangi kemiskinan namun kenyataannya program-program tersebut belum bekerja secara optimal. Artinya selain masih banyaknya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, pelayanan publik yang sulit dijangkau serta kesenjangan akan penguasaan sumber daya nantinya akan membuat kemiskinan berpotensi untuk meningkat.

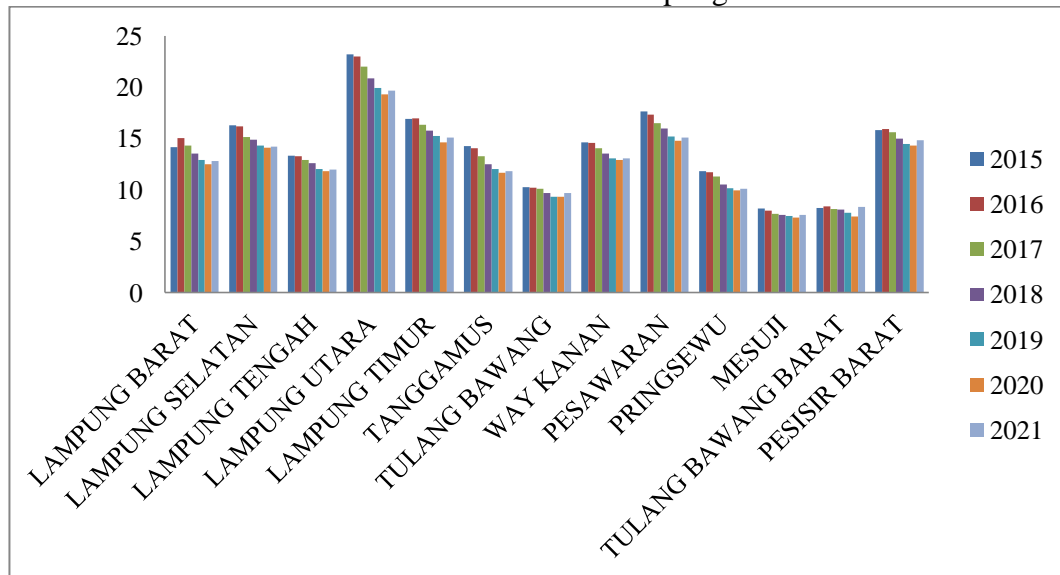
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung tahun 2015-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Secara umum persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 masih fluktuatif. Meskipun persentase penduduk miskin turun sebesar 1.73% sejak 2015 namun penurunan tersebut masih belum bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi Lampung. KEMENPAN menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 7 persen pada tahun 2024 mendatang. Meskipun pada tahun 2020 persentase kemiskinan telah menunjukkan trend yang terus menurun sejak 2015, akan tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan diakibatkan adanya pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara di belahan dunia. Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengemban amanat rakyat berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Dengan memperhatikan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia, pemerintah bertindak aktif dalam memprioritaskan anggaran dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar.

Gambar 2. Persentase Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2021



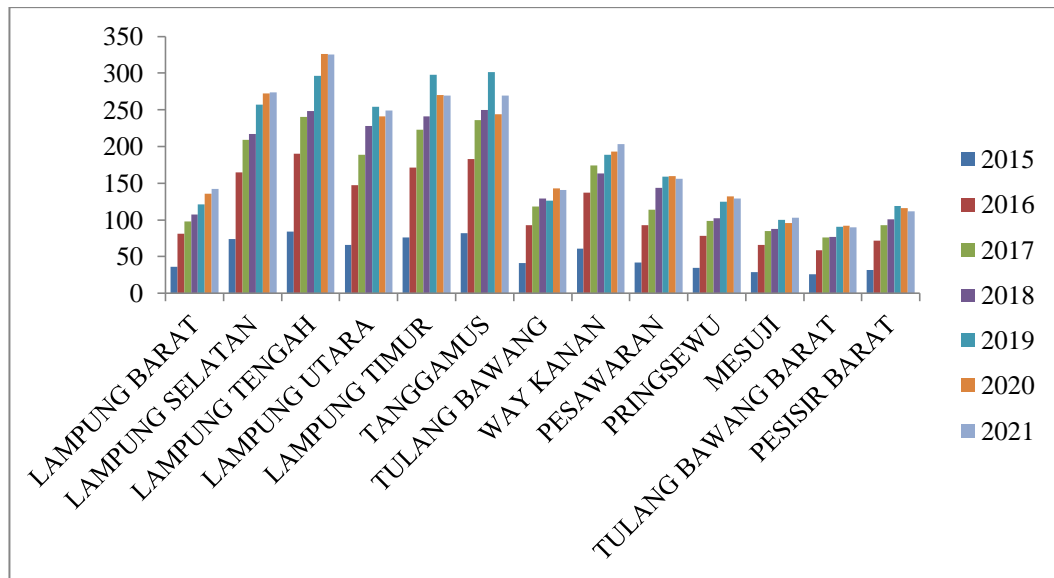
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Sejak tahun 2015, kemiskinan di Provinsi Lampung telah menunjukkan trend yang menurun hingga tahun 2019, akan tetapi dengan kemunculan pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 yang berdampak pada hampir seluruh sektor perekonomian dunia mengakibatkan kemiskinan kembali meningkat. Dapat dilihat pada Gambar 2. bahwa persentase kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Lampung Utara sejak 2015-2021 masih menjadi Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi. Bahkan persentase kemiskinan terendah pun masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kemiskinan tertinggi Kabupaten lainnya.

KPPOD (2021) kemiskinan di Provinsi Lampung merupakan sebagian besar hasil agregasi kemiskinan pedesaan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah buruknya akses di desa dan terhambatnya penyaluran dana pembangunan di desa oleh pemerintah pusat. Upaya pemerintah untuk terus mengurangi kemiskinan tidak terlepas dari berbagai kebijakan salah satunya adalah kebijakan dana transfer. Dana transfer ke daerah adalah instrumen transfer kepada daerah yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam RUU HKPD yang telah disahkan pada tahun 2021, transfer ke daerah terdiri atas enam jenis, yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Gambar 3. Realisasi Dana Desa di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2015-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan 2023, diolah

Kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) telah diberlakukan sejak sejak tahun 2015. Sejak saat itu besaran anggarannya terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu tujuan dari dana desa sebagaimana di muat dalam UU No. 6 Tahun 2014 yaitu untuk mengentaskan kemiskinan di daerah. Pengalokasian dana desa ini didasarkan pada formula yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Secara umum Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten yang menerima dana desa terbesar selama periode 2015-2021. Sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi kabupaten yang menerima dana desa terendah dari semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung.

Aliran dana atau transfer dana dari pusat ke daerah merupakan implikasi dari adanya otonomi daerah. Dengan demikian pemerintah desa dituntut untuk bisa mengimplementasikan kebijakan Dana Desa ini secara transparan dan akuntabel dan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan yang dirumuskan oleh aparatur desa dengan masyarakat. Ambya (2020) Dana Desa dilaksanakan dengan

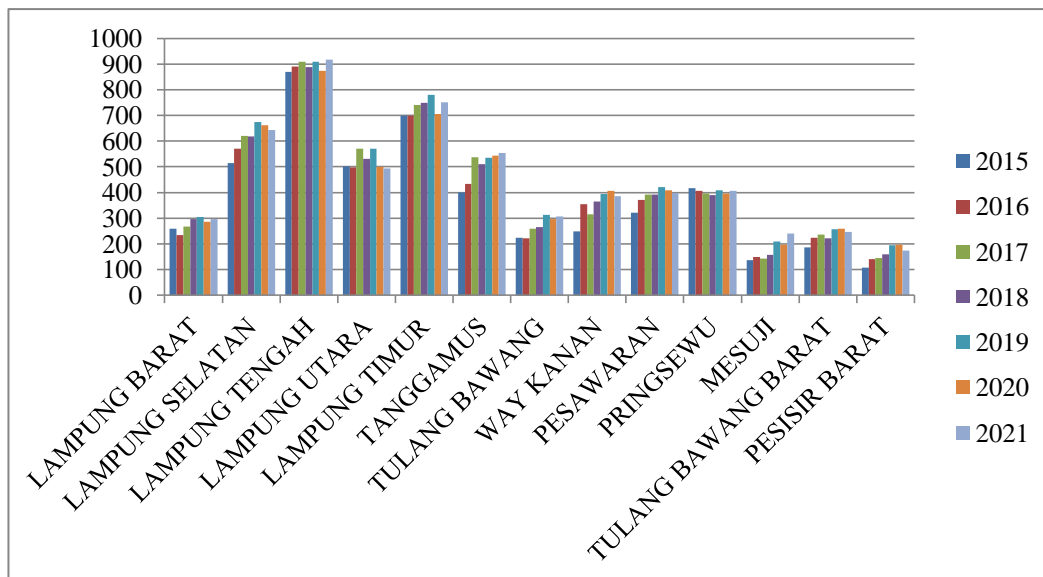
menggunakan prinsip hemat, terarah sesuai tujuan dan manfaat bagi masyarakat desa serta terkendali. Penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sigit & Kosasih (2020) dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di desa. Diperlukan peran dan fungsi desa dalam mengelola potensi desa baik secara fisik maupun non-fisik. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dilihat bahwa pemanfaatan dana desa sangat berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di desa.

Sektor Pendidikan memainkan peranan penting dalam pengentasan kemiskinan di daerah. Berbagai program pendidikan telah dilaksanakan pemerintah demi menciptakan SDM yang berkualitas sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda yang berkualitas dapat terbentuk dan nantinya diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas pula. Sejak tahun 2009, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN dan minimal 20% dari APBD untuk anggaran pendidikan (*mandatory spending*).

Dalam Permenkeu Nomor 86 Tahun 2009 Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah merupakan alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.



Gambar 4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2015-2021



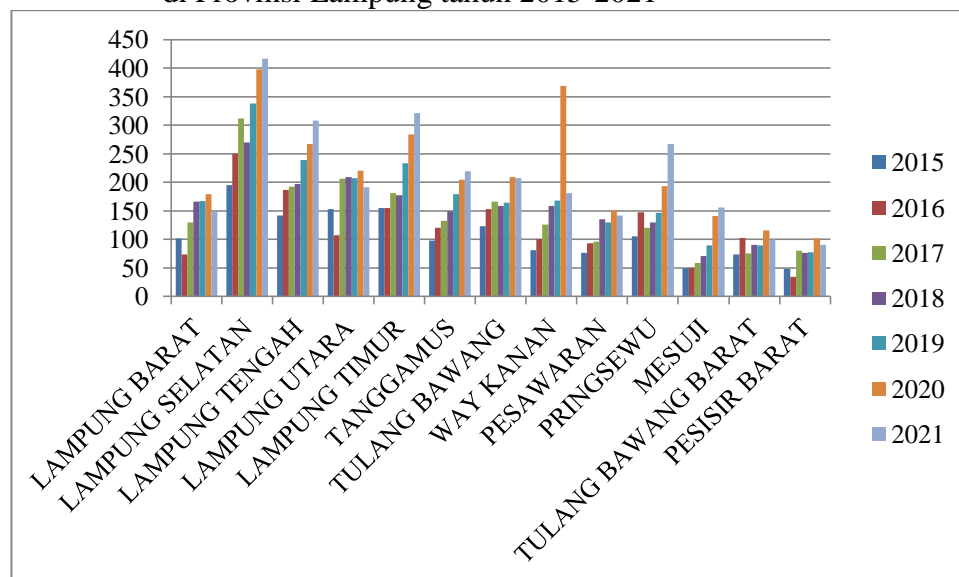
Sumber : Kementerian Keuangan 2023, diolah

Total alokasi pagu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tahun 2019 di Provinsi Lampung sebesar Rp2,55 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,41 triliun, lebih tinggi dari tahun 2018 baik dari segi alokasi pagu maupun realisasi belanja. Total alokasi pagu tahun 2018 sebesar Rp2,48 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,32 triliun. Apabila dibandingkan dengan total alokasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2019 di Provinsi Lampung yang mencapai sebesar Rp11,58 triliun, maka persentase alokasi pagu untuk sektor pendidikan di Provinsi Lampung tahun 2019 mencapai sebesar 22,02%, dan ini telah sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja pemerintah (DJPB, 2019). Palanewen (2018) secara parsial variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memberikan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. dapat disimpulkan bahwa pengeluaran sektor pemerintah belum tepat sasaran dalam menurunkan kemiskinan.

Keadaan penduduk yang sehat menjadi salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat diharapkan pembangunan akan berjalan lancar dan optimal. Pelayanan kesehatan merupakan

salah satu pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan diatur dalam UU no. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dimana Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan, agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Juga di anjurkan agar alokasi pembiayaan kesehatan ditujukan untuk pelayanan kesehatan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia dan anak terlantar.

Gambar 5. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2015-2021



Sumber : Kementerian Keuangan 2023, diolah

Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan total alokasi pagu tahun 2019 di Provinsi Lampung sebesar Rp383,00 miliar dengan realisasi sebesar Rp319,83 miliar, lebih rendah dari tahun 2018 baik dari segi alokasi pagu maupun realisasinya, total alokasi pagu tahun 2018 sebesar Rp394,07 miliar dengan

realisasi sebesar Rp334,43 miliar. Apabila dibandingkan dengan total alokasi pagu belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung yang tahun 2019 yang mencapai Rp11,58 triliun, maka persentase total alokasi pagu Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan tahun 2019 sebesar 3,3%, masih kurang dari batas minimal amanat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengamanatkan alokasi untuk sektor kesehatan sebesar 5% dari APBN di luar gaji (DJPB, 2019). Palanewen (2018) pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memperoleh hasil yang signifikan dan bernilai negatif. Artinya semakin besar pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan maka akan menurunkan kemiskinan. Kebijakan yang dilakukan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien sudah tepat sasaran. Namun faktanya masih banyak masyarakat yang kurang memiliki akses untuk kesehatan yang memadai.

Kesehatan merupakan faktor utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, dan sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah harus memprioritaskan kesehatan sebagai perhatian utama. Sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk hidup sehat, pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas. Pendidikan dan kesehatan bersama-sama berperan penting dalam proses pembangunan serta penanggulangan kemiskinan. Kedua sektor publik ini dapat membentuk sumber daya manusia yang sehat, kompeten dan berkualitas sehingga mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penduduk usia sekolah harus diberikan pelayanan pendidikan yang bermutu agar dapat bertahan dalam menjalani kehidupan di masa datang. Berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat memutus siklus kemiskinan dengan menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan individu untuk meningkatkan standar hidup mereka. Misalnya, dengan meningkatkan pendanaan untuk sekolah dan program pelatihan, pemerintah dapat meningkatkan akses ke pendidikan yang berkualitas dan menciptakan sumber daya manusia yang lebih terampil. Di sektor kesehatan, peningkatan investasi dalam infrastruktur dan layanan kesehatan dapat meningkatkan akses ke layanan kesehatan dasar, mengurangi beban penyakit, dan meningkatkan kesehatan penduduk secara keseluruhan.

Penting untuk dicatat bahwa peningkatan belanja pemerintah harus dibarengi dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien. Ini termasuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan ke tempat yang paling membutuhkannya, dan bahwa layanan diberikan dengan cara yang dapat diakses dan terjangkau oleh semua orang. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan merupakan komponen penting untuk mencapai SDGs. Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengurangi kemiskinan selama beberapa dekade terakhir, namun masih tetap menjadi tantangan besar, khususnya di daerah pedesaan dan di antara masyarakat yang terpinggirkan. Dengan adanya kebijakan dana transfer ini harapannya akan mengurangi angka kemiskinan nasional terutama di Provinsi Lampung. Sistem pemantauan dan evaluasi harus tersedia untuk memastikan bahwa dampak pengeluaran pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan terukur dan efektif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan meningkat setiap tahunnya tetapi ternyata kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam studi ini adalah ;

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dan tahun 2015-2021?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dan tahun 2015-2021?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dan tahun 2015-2021?
4. Bagaimana pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dan tahun 2015-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dan tahun 2015-2021.
2. Menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung 2015-2019 dan tahun 2015-2021.
3. Menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung 2015-2019 dan tahun 2015-2021.
4. Menganalisis pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung 2015-2019 dan tahun 2015-2021.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya bagaimana pengaruh dana desa, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap kemiskinan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian pustaka bagi para peneliti selanjutnya dan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian yang dilakukan selanjutnya oleh kalangan akademisi lainnya. Penelitian ini juga diharapkan bisa membantu pemerintah Provinsi Lampung untuk memutuskan bahan pertimbangan kebijakan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan berdasarkan variabel terkait.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Kemiskinan

Menurut Suharto (2009) dalam memahami kemiskinan terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*), yakni paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrasi.

##### 1). Teori Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigam ini individu dan mekanisme pasar menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan. Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan- pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan. Bagi pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilakukan bila institusi- institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompokkelompok swadaya, maupun lembaga- lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan. Paradigma neo liberal ini digerakkan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan (Suharto, 2009). Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subjek dalam permasalahan kemiskinan.

##### 2). Teori Paradigma Sosial Demokrasi

Paradigma Demokrasi Sosial Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan struktural. Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses- akses

bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (Suharto, 2009). Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Kelemahan teori ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membetuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan itu sendiri tergantung pada kapabilitas kelompok miskin. Melalui pendekatan ini dapat dilihat bahwa akar permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar pada kemampuan individu tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan. Perbedaan kedua paradigme tersebut dalam melihat kemiskinan maupun penyelesaian masalah kemiskinan sangat terlihat, baik dalam merumuskan penyebab maupun memberikan alternatif solusi mengatasi kemiskinan.

#### **2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Bappenas (2018) Hak-hak dasar tersebut diantaranya adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam lingkungan hidup, rasa aman, ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini



didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik, atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang tidak saja dialami oleh negara berkembang namun di negara majupun kemiskinan suatu yang pelik untuk diselesaikan. Ada beberapa definisi mengenai kemiskinan:

- 1). Mafahir & Soelistyo ( 2017) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty* adalah kemiskinan yang kronis atau turun temurun, Kedua *cyclical poverty* adalah yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan, Ketiga *seasonal poverty* adalah kemiskinan musiman yang menimpa nelayan dan petani, Keempat *accidental poverty* adalah akibat bencana alam sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan
- 2). Huda (2015) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Berdasarkan definisi-definisi diatas kemiskinan merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan karena kemiskinan mempunyai tolak ukur yang bukan hanya kekurangan dalam pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil di muka hukum dan sebagainya.

### **2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan**

Menurut World Bank salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikatakan miskin (*poor*) adalah tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan tidak memadai.

Kuncoro (1997) berpendapat penyebab kemiskinan bisa dianalisis melalui dua aspek, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Karena kedua aspek tersebut saling berkaitan. Adapun penyebabnya yaitu:

- 1). Rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja

adalah rasio antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

- 2). Lemahnya akses masyarakat terhadap faktor produksi, lemahnya akses tersebut jika dijabarkan yaitu:
  - a) Rendahnya akses modal usaha.
  - b) Lemahnya masyarakat dalam mengakses pasar.
  - c) Sedikitnya kepemilikan aset.

Selain kemiskinan dipandang dari segi ekonomi, kemiskinan juga dapat dilihat dari akses sosial. Adapun hal tersebut dapat dijabarkan yaitu:

- a) Rendahnya akses pendidikan. Pada negara terbelakang, pendidikan pada masyarakatnya terbilang rendah sehingga produktifitasnya akan rendah dan mengakibatkan penghasilan menjadi rendah.
- b) Rendahnya akses fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan di negara terbelakang jauh lebih sedikit dan tertinggal oleh negara maju.

### **2.1.2.3 Jenis-jenis Kemiskinan**

#### a). Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural muncul dikarenakan unsur budaya disuatu daerah yang membuat masyarakat tidak bisa terlepas dari kemiskinan itu sendiri, yang cenderung sulit untuk memperbaiki taraf hidup atau bisa dikatakan sebagai mentalitas kemiskinan. Selain itu, disebabkan pula oleh adanya adat, atau sifat dari para anggota masyarakat yang membuat mereka menjadi miskin. Pandangan hidup, nilai – nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat mendorong terwujudnya kemiskinan kultural. Ciri – ciri budaya miskin yaitu ketika keadaan masyarakat memiliki sistem perekonomian yang berorientasi pada mencari keuntungan, tingginya angka pengangguran, rendahnya upah yang diperoleh para pekerja, tidak adanya organisasi sosial, politik, dan ekonomi bagi kaum miskin yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya, adanya sistem kekeluargaan yang bilateral, dan adanya kelas masyarakat yang dominan menekankan padapenumpukan harta dan kekayaan, serta kesempatan untuk terus meningkat dalam status (*upward mobility*) (Palikhah, 2017)

b). Kemiskinan Struktural

Menurut Tan & Soemardjan (1980) kemiskinan struktural terjadi karena adanya struktur sosial yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses sumber-sumber pendapatan yang tersedia untuk mereka. Khomsan *et al.*, (2015) masih terdapat kesenjangan pada penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, yaitu didominasi oleh kelompok elit. Masyarakat tidak seluruhnya terlibat dalam pengambilan kebijakan sehingga menimbulkan kesenjangan dan terkadang terdapat aspek diskriminatif. Kemiskinan struktural akan berbeda sesuai dengan struktur sosial masyarakat dan pihak penguasa yang bermain. Masyarakat berada pada kondisi termarginalisasi dan dalam posisi struktur sosial yang timpang sehingga berada dalam kondisi miskin dan dimiskinkan. Kemiskinan struktural dapat berupa jenis pekerjaan sebagai petani/buruh tani dan pekerja informal, yang lebih memprioritaskan keseimbangan hidup dalam bermasyarakat, memiliki anggapan bahwa kebijakan pendidikan dirasa terlalu mahal, serta masih rendahnya partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

c). Kemiskinan Absolut

Lincoln (2006) Kemiskinan Absolut dilihat dari keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan masyarakat lebih rendah dari standar hidup yang ditentukan. Kemiskinan absolut dapat disebabkan karena adanya konflik, kesenjangan, kekerasan, kapasitas pemerintah yang terbatas, dan lain-lain.

d). Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diidentifikasi terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan Wahyu (2009) Ukuran standar minimum dilihat dari kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan berdasarkan pada golongan masyarakat termiskin.

#### **2.1.2.4 Karakteristik Penyebab Kemiskinan**

Beberapa ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu:

- 1) Pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan.
- 2) Tidak memiliki pekerjaan tetap.
- 3) Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan.
- 4) Tidak memiliki tempat tinggal.
- 5) Tidak terpenuhinya standar gizi minimal.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) karakteristik untuk menentukan rumah tangga miskin sebagai berikut:

- 1) Luas bangunan per anggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 meter persegi.
- 2) Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah.
- 3) Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain Sumber air minum bukan air minum bersih.
- 5) Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik.
- 6) Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang
- 7) Hanya sanggup makan satu sampai dua kali dalam sehari.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Tidak memiliki kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik.
- 10) Lapangan pekerjaan berupa petani/nelayan atau pekebun.
- 11) Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah.
- 12) Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp 500.000.
- 13) Jumlah penghasilan penduduk yang menjadi batas garis kemiskinan sebesar Rp 361.1990,- perkapita perbulan.
- 14) Jika minimal 9 (Sembilan) variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.

### **2.1.2 Pengeluaran Pemerintah**

#### **2.1.2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah oleh Keynes**

Dalam perekonomian modern, terjadi perubahan mendasar terkait peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian mulai dianggap penting setelah Keynes memasukkan sektor

pemerintah dalam analisis ekonomi makronya. Nenbee et al. (2021) pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang. Ini mencakup bidang-bidang seperti biaya berulang dan modal yang biasanya dikeluarkan pemerintah untuk pemeliharaan mereka sendiri dan ekonomi secara keseluruhan. Teori Keynes mengenai pengeluaran pemerintah dilatarbelakangi gagasan umum bahwa pengangguran terus menerus berasal dari penurunan total sektor swasta. Wahyudi (2020) pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tugas utama pemerintah di negara berkembang adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dilihat dari pengeluaran pemerintah/investasi pemerintah secara langsung di berbagai bidang. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan pada sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Investasi pemerintah pada kedua sektor publik tersebut akan meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan handal serta memperbaiki standar kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Iftitah & Wibowo (2022) berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Keynes menjelaskan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran menjadi alasan perlunya kebijakan keuangan belanja publik yang efektif dan efisien. Kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah merupakan alat kebijakan fiskal untuk memajukan perekonomian.

#### **2.1.2.2 Hukum Wagner (*Wagner's Law*) Mengenai Perkembangan Aktivitas Pemerintah**

Iftitah & Wibowo (2022) Hukum Wagner berpendapat bahwa peran dan belanja pemerintah (*government expenditure*) akan semakin meningkat seiring semakin bertumbuhnya perekonomian di suatu wilayah. Jaelani (2018) Wagner

mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Menurut Musgrave, kondisi demikian disebut sebagai “*law of growing public expenditures*”. Peningkatan ini terletak pada kegiatan dan kebutuhan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah dan penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah. Hukum Wagner menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kegiatan – kegiatan pemerintah, semakin meningkatnya kebutuhan pemerintah, dan pengeluaran negara.

### **2.1.2.3 Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi akan diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat. Ifitah & Wibowo (2022) Efisiensi ekonomi dari desentralisasi timbul ketika belanja pemerintah lokal lebih spesifik berdasarkan karakteristik setiap wilayah sehingga menghasilkan output lebih baik dibanding belanja yang tidak sesuai prioritas.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai asas *money follows function*.

### **2.1.3 Dana Desa**

#### **2.1.3.1 Pengertian Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014)

Dana desa sebagaimana yang dimaksud di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-undang desa mengamankan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

#### **2.1.3.2 Sumber Dana Desa**

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal yang telah di amandemen pada Peraturan Pemerintah yang telah di pertimbangkan dan di rumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa di alokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar.
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan mengenai hasil alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yaitu bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **2.1.3.3 Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa**

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer dari RKUD ke RKUDes.

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- 2) Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
- 3) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I berupa:
  - a) Surat pemberitahuan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan telah menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.



- b) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
- 2) Tahap II berupa:
- a) Laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
  - b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Tahap III berupa
- a) Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II.
  - b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II.

Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes dari kepala desa.
- 2) Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
- 3) Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa samapai dengan tahap II dari kepala desa.

#### **2.1.3.4 Tujuan Dana Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi mandiri sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

- 1) Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- 2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- 3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti pangan, energi dan layanan dasar.

- 4) Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APBDesa, rencana kerja pemerintah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa. Wahyuddin et al. (2020) Setiap desa di Indonesia memiliki kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sehingga desa menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah desa diharapkan dapat secara mandiri mengelola sumber dayanya termasuk keuangan dan kekayaan milik desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- 3) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- 4) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Upaya desa dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang meliputi desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang dan

desa maju atau mandiri. Sedangkan prioritas penggunaan dana desa untuk program dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, meliputi:

- 1) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- 2) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau dukungan BUMDes Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- 3) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- 4) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*Community Centre*).
- 5) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.
- 6) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan.
- 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 8) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### **2.1.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan**

Menurut Todaro & Smith (2011), pendidikan adalah masukan (*input*) bagi fungsi produksi nasional dalam perannya sebagai komponen modal manusia (*human capital*), yang berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia.

Peningkatan pendidikan merupakan tujuan tersendiri yang penting sebagai upaya peningkatan pembangunan. Modal manusia berdampak langsung terhadap pendapatan dan pembangunan secara lebih luas, meningkatkan pengetahuan tentang cara bekerja demi memperoleh hasil yang lebih baik, dan kemampuan untuk berorganisasi, serta kemampuan memanfaatkan peluang seiring ekonomi tumbuh. Ketika seseorang menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi maka pengembalian pribadi yang diharapkan meningkat jauh lebih cepat daripada biaya pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepirtual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia.

Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan sebagai mana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia dalam rangka menghadapi perkembangan zaman. Sebab kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari tingkat pendidikan masyarakatnya (Palenewen, 2018).

Upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas adalah prioritas pembangunan nasional. Dukungan anggaran pemerintah untuk pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi sumber daya manusia (*human capital*) untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Wahyudi (2020) Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan semakin ditingkatkan setiap tahunnya. Alokasi anggaran tersebut difokuskan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan tenaga pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### **2.1.5 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan**

Dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas. Mills & Gilson (1990) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.
2. Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
3. Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.
4. Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.

5. Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

Sektor kesehatan telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak lama. Pemerintah telah mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk sektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009). Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan: Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termantfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan, agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Juga di anjurkan agar alokasi pembiayaan kesehatan ditujukan untuk pelayanan kesehatan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia dan anak terlantar.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul Penelitian	Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Andi Eka Iftitah dan Puji Wibowo  Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa (2022)	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	- IDM - Dana desa, - Alokasi Dana Desa - PADes	- Penggunaan dana desa untuk belanja penyetoran modal BUMDes secara signifikan dan positif mempengaruhi nilai IDM di Kabupaten Gowa. Penelitian ini sekaligus mengonfirmasi riset terdahulu dan teori desentralisasi (Oates, 1999). BUMDes di Kabupaten Gowa berperan dalam penyediaan air bersih, pasar desa, jasa distribusi, maupun penyediaan kredit. - PADes secara signifikan dan positif mempengaruhi nilai IDM di Kabupaten Gowa. - Variabel ADD yang secara mandatory digunakan untuk operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM.
2.	Ambya  Transformasi Alokasi Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah Pedesaan di Indonesia (2020)	deskriptif kuantitatif	- Kemiskinan - Alokasi Dana Desa - Indeks Gini - Indeks Williamson	- Alokasi Dana Desa telah berkontribusi positif dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan.
3.	Wahyudin, Ar Royyan Ramly, Muslim A. Djalil, Mirna Indriani  Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Kecamatan Kuala Kabupaten nagan Raya) (2020)	<i>Random Effect Model (REM)</i>	- Kemiskinan - Dana Desa - Alokasi Dana Desa	- efektivitas penggunaan dana desa di kecamatan kuala masih belum efektif secara akumulatif. - Secaa statistik angka kemiskinan di kecamatan kuala masih mengalami kenaikan walaupun ditemukan pada tahun 2016 persentasenya rendah. - Dana desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan alokasi dana desa berpengaruh negatif.

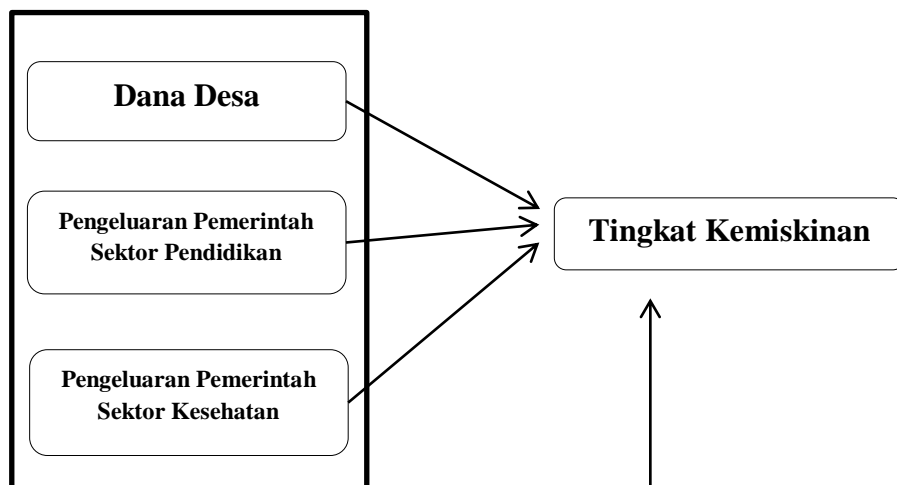
4. Tri Angga Sigit Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia (2020)	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	- Kemiskinan - Dana Desa - Alokasi Dana Desa - PDRB - Belanja Modal	- Dana desa, alokasi dana desa, serta PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. - Sedangkan variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.
5. Wahyudi Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia (2020)	<i>Random Effect Model (REM)</i>	- Pertumbuhan Ekonomi - Tingkat Kemiskinan - Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan - Sektor kesehatan - Sektor infrastruktur	- Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh signifikan - Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur tidak berpengaruh signifikan.
6. Themby O. M. Palanewen, Een N. Walewangko, Jacline I. Samual Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan (2018)	<i>Analisis Jalur (Path Analysis)</i>	- IPM - Kemiskinan - Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan - Sektor kesehatan	- Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan positif dan tidak signifikan terhadap IPM - Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan IPM - IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan - Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan - Sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.



### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kemenkeu (2023) diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan kestabilan dalam perekonomian, salah satunya melalui pengeluaran pemerintah melalui transfer dana desa dan pengeluaran pemerintah sektor publik. Pengeluaran pemerintah tidak hanya berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi secara tidak langsung untuk pengentasan kemiskinan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program dana desa merupakan salah satu solusi untuk membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat, dan juga dengan melihat pada peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Dengan demikian, dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 6. Kerangka Pemikiran.

Gambar diatas merupakan alur pikir penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

1. Diduga Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan tahun 2015-2021, *ceteris paribus*.
2. Diduga pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan tahun 2015-2021, *ceteris paribus*.
3. Diduga pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan tahun 2015-2021, *ceteris paribus*.
4. Diduga dana desa, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan tahun 2015-2021, *ceteris paribus*.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel. Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Data panel merupakan data yang mempunyai dua dimensi yaitu *cross section* dan *time series*. Kombinasi *time series* dan *cross section* dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan pendekatan yang tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan salah satu dari data tersebut (Gujarati, 2012). Dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas yaitu dana desa, dana desa, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Serta satu variabel terikat yaitu kemiskinan. Dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari *website* BPS Provinsi Lampung dan DJPK Kemenkeu

Tabel 2. Deskripsi Data

Variabel	Simbol	Satuan pengukuran	Sumber Data
Dana Desa	LNDD	Milyar Rupiah	DJPK Kemenkeu dan BPS Provinsi Lampung
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	LNEDU	Milyar Rupiah	DJPK Kemenkeu
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	LNHLT	Milyar Rupiah	DJPK Kemenkeu
Kemiskinan	YPOV	Persen (%)	BPS Provinsi Lampung

### **3.2 Definisi Operasional**

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan, secara teoritis, variable penelitian dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau objek dengan objek yang lain, adapun variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **3.2.1 Variabel Terikat (dependent variabel) (Y)**

Variabel terikat adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Besarnya efek tersebut dilihat dari ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak akibat perubahan dari variabel lain. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan yaitu tingkat kemiskinan tahun 2015-2019 dan tahun 2015-2021. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin yang berada di masing-masing kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Nilai variabel yang digunakan adalah persen (%).

#### **3.2.2 Variabel Bebas (independent variabel) (X)**

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah dana desa (X1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X2), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X3) tahun 2015-2019 dan tahun 2015-2021.

##### **a. Dana Desa**

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Dana Desa (DD) merupakan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa melalui transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nilai

variabel yang digunakan dalam hal ini adalah milyar rupiah (Rp).

b. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan sebagai mana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Nilai variabel yang digunakan adalah dalam milyar rupiah (Rp).

c. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari (APBN) dan 10% dari APBD. Nilai variabel yang digunakan adalah dalam milyar rupiah (Rp).

### **3.3 Wilayah Penelitian**

Wilayah yang menjadi fokus penelitian adalah 13 kabupaten di Provinsi Lampung yang menerima transfer dana desa. Hal ini dikarenakan Kota Bandar Lampung dan Kota Metro tidak lagi menerima Dana Desa. Peneliti menggunakan data sekunder yang terbentuk dari periode 2015-2021 yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (*independent variable*) terhadap variable terikat (*dependent variable*).

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengumpulan data (sample) yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan DJPK Kemenkeu.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menjawab tujuan penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda. Basuki (2017) Analisis regresi berganda pada umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier. Pengaruh variabel independen (karena umumnya ada korelasi antara variabel independen), dalam analisis regresi berganda dapat diukur secara terpisah dan secara bersama-sama terhadap konstruk variabel.

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melihat prediksi nilai dari Dana Desa (X1), Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan(X2) dan Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X3) terhadap tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Lampung, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen (X1, X2, dan X3) dengan variabel dependen (Y).

Model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$YPOV_{it} = a + LN\beta1DD_{it} + LN\beta2EDU_{it} + LN\beta3HLT_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(1)$$

(Sumber : Buku Agus Widarjono, 2016)

Dimana :

<i>YPOV</i>	= Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)
<i>a</i>	= Konstanta
<i>DD</i>	= Dana Desa (Realisasi APBN)
<i>EDU</i>	= Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Realisasi APBD)
<i>HLT</i>	= Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Realisasi APBD)
<i>β1</i>	= Koefisien regresi Dana Desa
<i>β2</i>	= Koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
<i>β3</i>	= Koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
<i>e</i>	= Error term

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Oleh karena itu, setiap data konstruk variabel harus terlebih dahulu diuji normalitasnya. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan (*a*) 0,05 atau 5% untuk menguji

apakah hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dengan cara menguji nilai F. Untuk menguji masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap tingkat kemiskinan dilakukan dengan menguji nilai t dengan uji dua sisi pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  atau 5%. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan bantuan program *Eviews 12*.

### 3.5.1 Regresi Data Panel

Keunggulan regresi data panel menurut Wibisono (2005) antara lain:

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
3. Data panel mendasar diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai study of dynamic adjustment.
4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informative, lebih variatif, dan kolinieritas (multiko) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dengan keunggulan tersebut maka implikasi pada tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Gujarati, 2012). Ada beberapa model regresi data panel, salah satunya adalah model dengan *slope* konstan dan *intercept* bervariasi. Model regresi data panel yang hanya dipengaruhi oleh salah satu unit saja (unit *cross-sectional* atau unit waktu) disebut model komponen satu arah, sedangkan model regresi data panel yang dipengaruhi oleh kedua unit (unit *cross-sectional* dan unit waktu) disebut model komponen dua arah. Secara umum

terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menduga model dari data panel yaitu model tanpa pengaruh individu (*common effect*) dan model dengan pengaruh individu (*fixed effect* dan *random effect*). Analisis regresi data panel adalah analisis yang didasarkan pada data panel untuk mengamati hubungan antar satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. Ada tiga pendekatan dalam regresi data panel (Widardjono, 2016).

a. *Common Effect Model* (CEM)

*Common Effect Model* adalah pendugaan yang menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time series* dan *cross section* dan menggunakan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*) untuk menduga parameternya (Widardjono, 2016). Metode OLS merupakan salah satu metode populer untuk menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linear. Model ini tidak memperhitungkan dimensi waktu atau individu, sehingga mengasumsikan bahwa perilaku data seseorang adalah sama dalam periode waktu yang berbeda.

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep (Widardjono, 2016). Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara individu namun intersepnya sama antar waktu (*time in variant*). Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar individu dan antar waktu. Pendekatan dengan variabel *dummy* ini dikenal dengan sebutan *Fixed Effect Model* atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) atau disebut juga *Covariance Model*.

c. *Random Effect Model* (REM)

Bila pada *Fixed Effect Model* perbedaan karakteristik-karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *intercept* sehingga *intercept*-nya berubah antar waktu. Sementara Model *Random Effect Model* membedakan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *error* dari model (Widardjono, 2016). Mengingat ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan *error*, yaitu individu dan waktu, maka *random error* pada REM juga perlu diurai menjadi *error* untuk komponen waktu dan *error* gabungan. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin



berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*. Model ini juga dikenal dengan teknik *Error Component Model* (ECM) atau *Generalized Least Squares* (GLS)

### 3.5.2 Pemilihan Model Regresi Estimasi Data Panel

Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih sesuai dengan keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu bank dan variabel penelitiannya. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. Menurut Widardjono (2016) ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Fixed Effect*. Kedua, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. Ketiga, uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Random Effect*

#### a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk melihat metode terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM), Dengan menggunakan *Redundant Fixed Effect Likelihood Ratio*. Penarikan kesimpulan dari hasil pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya (*P-value*). Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji *Chow* adalah sebagai berikut:

$H_0$  : *Common Effect Model*

$H_a$  : *Fixed Effect Model*

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika *P-value* < taraf nyata ( $\alpha$ ), maka  $H_0$  ditolak

Jika *P-value* > taraf nyata ( $\alpha$ ) maka  $H_0$  diterima

#### b. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (*random effect model*) dengan model efek tetap (*fixed effect model*). Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan

satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam model. Hipotesis pengujiannya sebagai berikut:

$H_0$  = Metode *Random Effect*

$H_1$  = Metode *Fixed Effect*

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika  $P\text{-value} < \text{ taraf nyata } (\alpha)$ , maka  $H_0$  ditolak

Jika  $P\text{-value} > \text{ taraf nyata } (\alpha)$  maka  $H_0$  diterima

### c. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random Effect* atau model *Common Effect* (OLS) yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi *Random Effect* didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut:

$H_0$  = *Common Effect Model*

$H_1$  = *Random Effect Model*

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika  $P\text{-value} < \text{ taraf nyata } (\alpha)$ , maka  $H_0$  ditolak

Jika  $P\text{-value} > \text{ taraf nyata } (\alpha)$  maka  $H_0$  diterima

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik dari hasil penelitian dalam persamaan regresi yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Iqbal (2015) Regresi data panel memberikan alternatif model, *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Model *Common Effect* dan *Fixed Effect* menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squared (OLS)* dalam teknik estimasinya, sedangkan *Random Effect* menggunakan *Generalized Least Squares (GLS)* sebagai teknik estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared (OLS)* meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak

semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS.

- a). Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.
- b). Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas.
- c). Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross section, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*.
- d). Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan.

#### a. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah variabel independen memiliki varian yang sama. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model antara lain proses belajar (*the error – learning models*) manusia, pilihan yang semakin banyak menyebabkan varians semakin tinggi maka kemungkinan besar akan terjadi heteroskedastisitas, dan kesalahan spesifikasi model. Keputusan untuk menentukan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada regresi linier yaitu dengan melihat nilai Prob. F-Statistik (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima yang artinya regresi linier terbebas dari heteroskedastisitas.

$H_0$  = Tidak terjadi heteroskedastisitas (Probabilitas F-statistik > 0,05)

$H_a$  = Terjadi heteroskedastisitas (Probabilitas F-statistik < 0,05)

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jika antar variabel independen terjadi multikolinearitas sempurna, maka koefisien regresi variabel independen tidak dapat ditentukan dan nilai *standart error* menjadi tak terhingga. Jika multikolinearitas antar variabel independen tinggi, maka koefisien regresi variabel independen dapat ditentukan, tetapi memiliki nilai *standard error* tinggi berarti nilai koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan tepat. Suatu regresi dikatakan terjadi multikolinearitas apabila nilai matrik korelasi (*correlation matrix*)  $< 0,85$ .

$H_0$  = Tidak terjadi multikolinearitas (*correlation matrix*  $< 0,85$ )

$H_a$  = Terjadi multikolinearitas (*correlation matrix*  $> 0,85$ )

### 3.5.4 Pengujian Hipotesis

a. Uji t-statistik (Uji Parsial)

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen, secara individual terhadap variabel dependen secara parsial (Widardjono, 2016)

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1.  $H_0: \beta_{IDD} = 0$  : Tidak ada pengaruh negatif variabel dana desa terhadap tingkat kemiskinan.

$H_a: \beta_{IDD} < 0$  : Ada pengaruh negatif variabel dana desa terhadap tingkat kemiskinan.

2.  $H_0: \beta_{2EDU} = 0$ : Tidak ada pengaruh negatif variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap tingkat kemiskinan.

$H_a: \beta_{2EDU} < 0$ : Ada pengaruh negatif variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap tingkat kemiskinan.

3.  $H_0: \beta_{3HLT} = 0$ : Tidak ada pengaruh negatif variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap tingkat kemiskinan.

$H_a: \beta_{3HLT} < 0$ : Ada pengaruh negatif variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap tingkat kemiskinan.

Kriteria pengujiannya adalah:

- a. Jika nilai t-statistik > nilai t-tabel maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$
- b. Jika t-statistik < nilai t-tabel maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$

Jika  $H_0$  ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika  $H_0$  diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

b. Uji F-Statistik (Uji Simultan)

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. (Widardjono, 2016)

Hipotesis dari penelitian ini:

1.  $H_0 : \beta_{IDD} = \beta_{2EDU} = \beta_{3HLT} = 0$ , artinya variabel dana desa, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
2.  $H_a : \beta_{IDD} \neq \beta_{2EDU} \neq \beta_{3HLT} \neq 0$ , artinya variabel dana desa, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Kriteria pengujiannya adalah:

- a.  $H_0$  ditolak jika nilai  $F_{hitung} >$  nilai  $F_{tabel}$ , yang berarti secara bersama sama, atau salah satu dari variabel independen berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen.
- b.  $H_0$  diterima jika nilai  $F_{hitung} <$  nilai  $F_{tabel}$ , yang berarti secara bersama sama, atau salah satu dari variabel independen tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.5.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. (Widardjono, 2016) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan suatu ukuran yang penting dalam analisis regresi linear, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  dikategorikan kedalam dua hal yaitu jika nilai  $R^2$  semakin besar (mendekati nilai 1) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lebih besar. Begitu pula sebaliknya jika nilai  $R^2$  semakin besar (mendekati nilai 0) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kecil. Sehingga besaran nilai  $R^2$  berada antara 0 sampai 1 atau  $0 < R^2 < 1$ .

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil regresi menggunakan model REM dan uji signifikansi variabel secara parsial menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 bahkan setelah terjadi pandemi COVID-19 yakni pada periode penelitian 2015-2021 dana desa tetap signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Lampung. Artinya semakin meningkatnya dana desa maka akan semakin menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung, *ceteris paribus*. Dana Desa merupakan dana yang signifikan dalam peranannya mengurangi kemiskinan di daerah karena memang pada dasarnya ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pelayanan publik, perekonomian desa serta memperkuat masyarakat desa agar tidak hanya menjadi objek melainkan sebagai subjek pembangunan.
2. Hasil regresi menggunakan model REM dan uji signifikansi variabel secara parsial menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan memiliki pengaruh yang negatif namun belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2019. Terlebih lagi setelah terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada sektor pendidikan dengan diberlakukannya sistem pembelajaran daring malah menyebabkan masalah baru karena keterbatasan dalam menjangkau teknologi dan internet. Pada periode penelitian tahun 2015-2021, hasil regresi dan uji signifikansi menunjukkan hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung. Hasil tersebut berlawanan dengan teori bahwa dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan menurunkan kemiskinan, namun sebaliknya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan belum terfokusnya dana

pendidikan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru namun masih fokus pada pembangunan infrastruktur. Selain itu hanya sebesar 50 persen dari jumlah anak usia sekolah yang menyelesaikan pendidikannya sampai SMA sesuai program wajib belajar 12 tahun. Fenomena tersebut menyebabkan rendahnya kualitas SDM yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak.

3. Hasil regresi menggunakan model REM dan uji signifikansi variabel secara parsial menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 namun periode penelitian tahun 2015-2021 belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan. Artinya semakin meningkatnya Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan maka akan semakin menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung, *ceteris paribus*. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk memberikan peningkatan layanan publik terutama di bidang kesehatan terlebih lagi setelah pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk memprioritaskan dana anggaran untuk bidang kesehatan.
4. Hasil regresi menggunakan model REM dan uji signifikansi koefisien variabel secara simultan menunjukkan bahwa Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung periode tahun 2015-2019 dan periode tahun 2015-2021, *ceteris paribus*.



## 5.2 Saran

1. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang telah diatur didalam undang-undang. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program-program pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah. Disisi lain, prioritas pengembangan sektor pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan guna menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam pasar tenaga kerja baik domestik maupun internasional.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan belum dapat secara signifikan menunjukkan pengaruh terhadap penurunan kemiskinan pada periode penelitian ini, sehingga perlu adanya penelitian dengan periode yang lebih panjang dengan mempertimbangkan tingkat penyelesaian pendidikan di daerah sebagai variabel yang mempengaruhi sehingga dapat diketahui dampaknya terhadap penurunan kemiskinan.
3. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai aspek diluar variabel dalam penelitian ini dan membentuk siklus sehingga diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan analisis jalur untuk menganalisis sebab-akibat serta mengetahui sejauh mana variabel-variabel diluar penelitian ini berkontribusi terhadap kemiskinan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menunjukkan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah dengan lingkup penelitian yang lebih mengerucut dengan periode penelitian yang lebih lama sehingga dapat dilihat pengaruhnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambya, A. (2020). Transformasi Alokasi Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 16–23. <https://doi.org/10.23960/jep.v9i1.84>
- Bappenas. (2018). Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. *Kedeputian Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan*, 1–80.
- Basuki, T. A. (2017). *PENGANTAR EKONOMETRIKA* (2nd ed.). Danisa Media.
- Bloom, D. E., Canning, D., Chan, K., & Luca, D. L. (2014). Higher Education and Economic Growth in Africa. *International Journal of African Higher Education*, 1(1). <https://doi.org/10.6017/ijahe.v1i1.5643>
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan : Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 11–18. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/1513>
- DJPB. (2019). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2019*. 53–54.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika* (5th ed.). Salemba Empat.
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam* (Edisi Kedu). Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=hcSZDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ekonomi+pembangunan+islam&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj-8N2XgunnAhUbwjgGHWjYCuwQ6AEIKzAA#v=onepage&q=ekonomi&f=false>
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17–36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel ( 2 ) " Tahap Analisis ". *Sarana Tukar Menukar Informasi Dan Pemikiran Dosen*, 2, 1–7.
- Jaelani, A. (2018). Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017. *SSRN Electronic Journal*, 1–14. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3185800>
- Kemenkeu. (2023). *Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Provinsi Lampung*. 14.
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Saharuddin, Alfiasari, Syarief, H., & Sukandar, D. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Pertama). Yayasan Pustaka Obor. <https://books.google.co.id/books?id=IDZDDAAAQBAJ&printsec=frontcove>

r#v=onepage&q&f=false

- KPPOD. (2021). *Dana Transfer Ke Daerah Dalam Ruu Hkpd*. 2–102.  
[https://www.kppod.org/backend/files/laporan\\_penelitian/TKDD dalam RUU HKPD\\_Policy Note - KPPOD.pdf](https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/TKDD_dalam_RUU_HKPD_Policy_Note_-_KPPOD.pdf)
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan* (Edisi Keti). UPP AMP YKPN.
- Lincoln, A. (2006). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Keem). STIE YKPN.
- Mafahir, A., & Soelistyo, A. (2017). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jie.v1i2.6074>
- Mills, A., & Gilson, L. (1990). *Ekonomi Kesehatan Untuk Negara-Negara sedang Berkembang*. Dian Rakyat.
- Nenbee, S. G., Aleogho, I. Z., Vite, B. N., & Otovwe, E. E. (2021). An Empirical Investigation of Government Spending in Primary School Enrolment and Poverty Reduction in Nigeria. *International Journal of ...*, 8(6), 1–10.  
<https://www.ijrhss.org/papers/v8-i6/1.pdf>
- Palenewen, T. O. M. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 52–61.
- Palikhah, N. (2017). Konsep Kemiskinan Kultural. *Alhadharah*, 15(30), 1.  
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1205>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1, Ayat 2.
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Rachmat, hapsara habis. (2018). *Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan di indonesia*. Gadjah Mada University Press.  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=IcBjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kesehatan+di+indonesia&ots=hIZjfv4OBH&sig=0FQAC9It dzMQDlvoprCQVVpAA68&redir\\_esc=y#v=onepage&q=kesehatan di](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=IcBjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kesehatan+di+indonesia&ots=hIZjfv4OBH&sig=0FQAC9It dzMQDlvoprCQVVpAA68&redir_esc=y#v=onepage&q=kesehatan di)

indonesia&f=false

- Roseline, F. C., & Maimunah, E. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(2), 227–240.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (3rd ed.). Rafika Aditama. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=7745&lokasi=lokal>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 340. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4183>
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di jawa timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514–526. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6288>
- Syauqi, I., & Arsyianti, Iaili dwi. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (2nd ed.). Rajawali Pers. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=969369#>
- Tan, M. G., & Soemardjan, S. (1980). *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*. Pulsar.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi Kese). Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UNDP. (2003). *The Role of Economic Policies in Poverty Reduction*. 1–11.
- Wahyu R, T. (2009). Kemiskinan dan Bagaimana Mengatasinya. *AKSES : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(7), 56–64.

- Wahyuddin, Ramly, A. R., Djalil, M. A., & Indriani, M. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Kuala, Kab Nagan Raya. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.32487/jshp.v4i1.666>
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 103–113.
- Wibisono, D. (2005). *Metode Penelitian & Analisis Data*. Salemba Medika.
- Widardjono, A. (2016). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Ekonisia.